PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL HALAL PADA USAHA KECIL

Andy Kusumajaya Darsono ^{*1}
Rachmat Ihya ²

^{1,2} Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya
^{*}e-mail : ihya@unsuri.ac.id

Abstrak

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil. untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Label Halal

Abstract

The subject matter of this research is how is the legal protection for consumers of ipangan products in itan packaging without halal labeling in small businesses. This study aims to determine how the regulation of ipangan products without halal labeling in its connection with the protection of consumers, and what legal efforts can be made by consumers in obtaining protection of their rights. The research method used in this research is inormative legal research with a statutory approach, and a conceptual approach. iInformation is obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and secondary legal materials. iWhile legal materials both primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials are described and connected in such a way, so that they are displayed in a more systematic writing to answer the problems that have been formulated. From the results of the research mentioned above, it can be concluded that the obligations that must be carried out and carried out by business actors, especially small business actors, to include halal labels on the packaging of each product produced in accordance with Article 8 paragraph i (1) letter of the GCPL Law, and legal remedies that can be taken by consumers in accordance with the GCPL Law, namely being able to resolve disputes directly to business actors, complaints through YLKI, settlement through the POM Agency, reports to BPSK and settlement through the General Court.

Keywords: Consumer Protection, Food Products, Halal Labeling

PENDAHULUAN

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat

tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹ Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang undang tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggungjawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.

Perkembangan ekonomi yang kian pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk khususnya produk pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi di zaman perdagangan bebas ini, semakin banyak uang gerak bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya dan mengakibatkan produk luar menjadi semakin lebih mudah masuk ke Indonesia. Usaha kecil khususnya home industri sebagai penyedia barang atau produsen pada saat ini produk yang dihasilkan pun sudah banyak beredar. Dengan berbagai macam produknya seperti abon, bakso, sosis dan lain-lain. Produk-produk tersebut belum pasti kehalalannya, karena dalam kemasan tersebut tidak tercantum adanya label halal yang menunjukkan kurangnya pengawasan aparat terhadap produk makanan olahan. Karenanya, pengawasan perlu dilakukan terhadap semua industri, baik kecil, menengah maupun besar. Sebab, tak lain dan tak bukan, yang merugi jelas-jelas konsumen, khususnya konsumen muslim. Sudah harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli makanan enak dan terjamin, malah mendapat makanan haram.

Dengan banyaknya variasi produk pangan yang semakin banyak membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis dan kualitas produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sisi lain, tidak adanya jaminan yang pasti terhadap produk-produk tersebut, maka muncullah persoalan tersendiri bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim, rakyat Indonesia menuntut tanggung jawab yang besar dari pemerintah dalam menjaga produk pangan yang beredar. Baik dalam hal cita rasa, sanitasi hygiene, kandungan gizi yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya. Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal.²

Berkenaan dengan hal ini Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010) cetakan ke 1

² Ahmadi Mirudan Sutaman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.80

1996 tentang Pangan dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal pada, didalam dan atau di kemasan pangan,² namun Undang-Undang ini dan UUPK No. 8 Tahun 1999 sepertinya tidak berjalan dengan baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

Dengan adanya masalah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan UUPK mengenai label halal bagi usaha kecil serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya, khususnya dalam produk pangan tanpa label halal yang didasari oleh UUPK No. 8 Tahun 1999. Penulis menuangkan dalam bentuk skripsi atau sebuah karya ilmiah dengan mengambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka yang ada.³

Pendekatan Masalah

Mengingat tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni suatu penelitian yang meneliti suatu masalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam studi hukum, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan bagi konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan karena isu hukumnya menggunakan isu hukum pada level teori hukum (konsep). Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah tentang konsep dasar perlindungan konsumen, hak serta kewajiban atas konsumen dan pelaku usaha, sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dan lain-lain.

Prosedur Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola-pola kecurangan dalam pelanggaran para pelaku usaha tersebut sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam menangani masalah

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.13-14

perlindungan terhadap para konsumen yang dirugikan oleh para pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Yang Mengatur Tentang Pencantuman Produk Pangan Berlabel Halal Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Penentuan halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era global ini tidaklah mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Banyak penyebabnya antara lain karena banyaknya bahan baku dan bahantambahan yang menggunakan bahan-bahan dari non muslim atau negara barat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal, pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi. Masalah kedua, mengetahui komposisi dan asal-usul serta cara memproduksi makanan dan minuman. Ketiga yaitu pihak yang berwenangbekerja keras menyusun daftar bahan baku dan bahan tambahan yang sudah diperiksa kehalalannya.⁴

Makanan yang kita makan tidak selamanya baik dan halal, Mungkin saja ada terdapat sesuatu yang haram di dalamnya atau disaat pembuatannya menggunakan unsur-unsur yang haram. Banyaknya produk di pasaran yang tidak mencantumkan label halal bisa menjadi kekhawatiran bagi kita. Produk pangan yang kita konsumsi sebaiknya kita pastikan dahulu, kita perhatikan tanggal kadaluarsanya yang terdapat dalam kemasan. Melihat label halal dan membaca isi kandungan dalam produk yang akan kita konsumsi itu. Untuk menghindari kecurigaan terhadap makanan yang dianggap halal atau telah diberi label halal sebaiknya kita perhatikan juga hal-hal berikut :⁸

1. Bahan-bahan yang digunakan adalah halal,
2. Komponen ramuan dan bahan tambahan adalah halal,
3. Proses produksi berdasarkan syari'at Islam.

Saat ini era pasar bebas sudah semakin dekat. Kita banyak mengkonsumsi makanan yang berasal dari impor. Masalah kehalalannya sebagian besar dipertanyakan dan masih perlu pengawasan serius baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, khususnya konsumen yang beragamaIslam. Secara langsung atau tidak, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim itu menghadapi berbagai macam produk yang masih harus dipertanyakan kehalalannya. Untuk itu kita harus berhati-hati dan tidak sembarangan dalam mengkonsumsi produk-produk tersebut.

Produk halal kini bukan lagi semata-mata isu agama, tetapi sudah menjadi isu di bidang bisnis perdagangan. Saat ini, jaminan sebuah produk sudah menjadi simbol global bahwa produk yang bersangkutan terjamin kualitasnya. Selain itu, masyarakat dunia sekarang cenderung memilih produk- produk yang berlabelkan halal. Sebab, kualitas produk halal akan lebih terjaga dari segala macam penyakit yang ada di dalamnya.

Sosialisasi makanan akan pentingnya makanan halal belum sampai pada tingkat kesadaran masyarakat, khususnya bagi produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal dan mencantumkan label halal. Informasi tentangmakanan yang halal pun belum terlalu sering dilakukan, sehingga masyarakat masih harus tetap berhati-hati untuk memastikan kalau makanan yang dikonsumsi itu halal atau haram.

Dalam hal ini, perlindungan konsumen terhadap produk-produk di pasaran imenjadi tugas pemerintah dan masyarakat agar terhindar darimengkonsumsi pangan yang tidak halal. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan berlabel halal harus benar-benar diterapkan agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugkan. Adapun peraturan-peraturan yang terkait tentang pencantuman produk pangan berlabel halal yaitu :

1. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang

⁴ Diana Candra Dewi, M.Si,*Rahasia Dibalik Makanan Haram*,(UIN-Press, 2007) h.121

berkaitan dengan Label halal mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 Ayat (1) huruf h.

2. UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Di dalam UU No.7 Tahun 1996 terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab IV mengenai Label dan Iklan Pangan pada pasal 30 dan 34.

3. PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

4. Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I.1996 tentang pencantuman tulisan "Halal" pada label makanan.

2. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Oleh Konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya

Dalam usaha meraih calon konsumen, sering kali pelaku usaha kurang memperdulikan akan hak-hak konsumen, yaitu hak atas informasi, keamanan dan keselamatan, sehingga dapat merugikan konsumen/masyarakat pengguna produk makanan dan minuman tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya adalah sebagai berikut:

A. Penyelesaian Langsung Kepada Produsen.

Yang dimaksud penyelesaian sengketa secara langsung kepada produsen yaitu konsumen dapat mengajukan komplain kepada pelaku usaha (produsen) untuk menyelesaikan masalah produk pangan dalam kemasan tanpa label halal, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat berupa barang/produk, kwitansi pembelian, dan keterangan saksi-saksi. Dengan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri berarti konsumen telah menerapkan hak dankewajibannya. Disamping itu juga menunjukkan sikap kritis konsumenterhadap pelaku usaha.

B. Melapor keYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya berarti pula bahwa dorongan terhadap produsen untuk menghasilkan barang yang terjamin mutunya. Dengan demikian konsumen tidak akan mengalihkan perhatiannya pada produk luar negeri. Kepercayaan konsumen yang diterima oleh produsen dengan sendirinya membuat produsen memperbesar volume produksinya. Ini berarti bahwa produsen akan menambah jumlah tenaga kerjanya yang akan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat. YLKI sebagai lembaga sosial dapat berperan aktif sebagai lembaga mediasi dalam melindungi konsumen, menumbuhkan kesadaran konsumen atas haknya, memberikan masukan kepadaprodusen atas kewajibannya, serta berbagai masukan kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi produsen dan perlindungan konsumen.

C. Penyelesaian Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM ini dibentuk oleh pemerintah untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. BPOM merupakan badan yang independen yang artinya tidak memihak kepada produsen sebagai pihak pemberi barang dan jasa, pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan jasa. Adapun sarana pengaduan yang disediakan oleh BPOM sama dengan sarana yang disediakan oleh YLKI.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa konsumen di atas termasuk ke dalam bentuk penyelesaian sengketa konsumen secara damai. UU Perlindungan Konsumen mengaturnya dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen. Inti dari Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yaitu, UU Perlindungan Konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, dan sebaiknya dilakukan sebagai upaya pertama sebelum diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa penyelesaian sengketa

konsumen secara damai tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha. Atas pengaduan yang disampaikan dan upaya penyelesaian kepada pihak-pihak di atas, jika tidak mendapat tanggapan dari para pelaku usaha maka UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen merupakan Pasal yang khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, baik melalui BPSK maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen gugatan sengketa konsumen tersebut dapat diajukan kepada pengadilan umum oleh beberapa pihak yaitu konsumen sebagai individu atau kuasa/ahli warisnya. Kelompok konsumen dengan kelompok sama melalui gugatan *class action*. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau pemerintah dan/atau instansi terkait bila produk pangan tanpa label halal tersebut mengakibatkan kerugian materi yang besar.

Dalam hal ini, gugatan sengketa konsumen yang dapat diajukan oleh konsumen adalah gugatan oleh LSM dengan *Class Action*. Kelebihan kedua instrumen ini terletak pada dapat diwakilinya banyak konsumen yang menderita kerugian, memiliki kepentingan, serta menuntut pemulihan yang sama. Kerugian yang sama yaitu tidak memenuhi syarat keamanan produk pangan tersebut tidak berlabel halal. Kepentingan dan tuntutan pemulihan yang sama yaitu adanya tuntutan ganti rugi atas kerugian yang konsumen derita dan pemulihan baik terhadap jiwa maupun pemulihan kesehatan dan harta benda. Jika konsumen merasa berat menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan, maka upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan kepada BPSK.

D. Melapor Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak selamanya baik, pasti akan timbul perselisihan atau sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama. Berdasarkan Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Di luar peradilan umum, UU Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui peradilan umum.

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, mudah, dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen.⁴

Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari BPSK tidak

dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak bisa mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.

Jika putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan. Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan.

E. Penyelesaian Melalui Peradilan Umum.

Walaupun putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, pihak-pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputuskan dalam waktu 21 hari dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri ini dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang akan diputuskan dalam waktu 30 hari, dengan waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dijelaskan dalam pasal 48 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam dunia bisnis merupakan suatu masalah tersendiri, dikarenakan dalam penyelesaian sengketa di dalam pengadilan sangat membutuhkan biaya banyak, sedangkan kita tahu bahwa dunia bisnis sangat menghendaki penyelesaian sengketa dengan harga murah dan cepat. Disamping itu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat merusak hubungan pelaku bisnis dengan siapa dia pernah terlibat sengketa, dikarenakan penyelesaian sengketa dalam pengadilan akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak.

Secara umum, ada beberapa kritikan yang dapat dikemukakan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu:

- 1). Penyelesaian sengketa yang sangat lambat
- 2). Biaya perkara yang mahal
- 3). Pengadilan pada umumnya tidak responsif
- 4). Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Upaya-upaya hukum yang telah disebutkan di atas dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak berlabel halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Walaupun terdapat upaya hukum yang dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen, ternyata dalam prakteknya konsumen sering mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan, antara lain karena pelaku usaha yang akan digugat oleh konsumen tidak jelas, baik nama atau alamatnya maka, gugatan pun tidak dapat ditentukan karena tidak ada pihak yang dimintai pertanggung jawaban.

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa peran label halal dalam kemasan sangat penting yaitu dalam hal pemberian informasi produk tersebut dan dalam hal penuntutan bila terjadi kerugian pada pihak konsumen (terdapat nama dan alamat yang jelas dari pelaku usaha pada label kemasan produk pangan).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan

konsumen bahwa para pelaku usaha harus mencantumkan label halal pada setiap produk pangan yang diproduksi dan diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- (2) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam Label.

Dengan adanya pengaturan tersebut para pelaku usaha tidak boleh melanggar peraturan yang telah ada, agar para konsumen khususnya konsumen muslim tidak dirugikan oleh pelaku usaha dan dapat memilih produk pangan yang diinginkan dengan jelas dan nyaman karena adanya pencantuman label halal pada kemasan, maka tidak ada keraguan lagi mengenai kehalalannya.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil telah mendapat pengaturan dalam UUPK. UUPK memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut melalui 2 cara, yaitu dengan cara damai atau melalui gugatan ke pengadilan atau BPSK. Cara-cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelesaian secara langsung kepada pelaku usaha.
- b. Pengaduan melalui YLKI, yang dapat dilakukan secara langsung baik secara lisan maupun tertulis, melalui surat, telepon, e-mail, fax, media cetak dan elektronik. Selanjutnya YLKI dapat menempuh penyelesaian pengaduan konsumen melalui beberapa cara, yaitu mediasi, atau penyelesaian dengan cara ke pengadilan yang dikenal dengan gugatan lembaga konsumen.
- c. Penyelesaian melalui iBPOM.
- d. BPSK juga menerima pengaduan dan pengajuan penyelesaian sengketa dari konsumen, tetapi disyaratkan bahwa konsumen telah melakukan upaya penyelesaian secara langsung kepada pelaku usaha tetapi tidak mendapat tanggapan dari pelaku usaha. Dengan demikian atas pengaduan konsumen ke BPSK tersebut dapat diselesaikan melalui BPSK juga.
- e. Penyelesaian melalui Lembaga peradilan umum, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN).

Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam masalah pencantuman label halal pada kemasan, maka pertanggung jawaban pelaku usaha khususnya usaha kecil terhadap konsumen harus ditingkatkan dengan memberikan informasi produk terkait label halal dengan benar, jelas dan jujur. Kepada konsumen harus teliti terlebih dahulu dalam membeli produk khususnya produk halal yang tertera pada kemasan demi keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Memberdayakan BPSK yang lebih profesional dan lebih netral tidak memihak kepihak manapun, baik pelaku usaha maupun konsumen. Agar para pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa puas dengan hasil keputusan BPSK sehingga tidak perlu menyelesaikan sengketa tersebut lewat Peradilan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2010
- Barkatullah, Abdul. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: DiaditMedia, 2006.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Al-bugha Musthafa dan Muhyiddin Misto, *Pokok-Pokok Ajaran Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2006.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Agung, Marya dan Eka, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Soekanto, Soejorno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gaharpung Marianus, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jurnal Yustika, 2000.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Media Grafika, 2008.
- Sofie Yusuf dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- CandraDewi, Diana, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*. UIN-Press, 2007. Departemen Agama RI, *Islam dan Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan*
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 *Tentang Penetapan Produk Halal*.